

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Baiknya sebuah proses pembangunan pada suatu daerah dapat ditinjau berdasarkan bagusnya tingkat perekonomian yang dipunya. Setiap masing – masing daerah menjadikan laju pertumbuhan ekonomi untuk menetapkan perencanaan dan pembangunan bagi daerahnya. Pertumbuhan ekonomi biasa diartikan sebagai bentuk perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah yang dilihat dari tahun ke tahun. Daerah dengan ekonomi yang baik dikatakan memiliki perubahan pertumbuhan ekonomi secara signifikan untuk dijadikan patokan bagi pembangunan dan penyelesaian ketimpangan. Secara teoritis dapat dikatakan jika pendapatan yang didapat oleh masyarakat menjadi tinggi atau naik pada suatu daerah, maka hal itu akan menyebabkan tingginya sebuah kesejahteraan di daerah tersebut (Tengah, 2021).

(Todaro, Michael P., Smith, 2014). Pertumbuhan PDB ataupun PDRB secara ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Seperti teori “*trickle down effect*” yakni manfaat pertumbuhan ekonomi untuk pendudukan miskin tidak berubah seperti yang diharapkan. Yakni apabila pemerataan tidak terjadi sesuai dugaan maka hanya masyarakat dengan pendapatan/modal besar dan para golongan atas yang menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi bertahap dari tahun ke tahun.

Meski demikian pada teori ini memiliki banyak kekurangan yakni peluang pada investor yang akan berinvestasi terhadap penggunaan teknologi akan menyebabkan sulitnya penyerapan tenaga kerja dikarenakan sudah terfokus pada penggunaan teknologi yang instan dengan begitu akan menyebabkan peralihan modal secara sepihak dan menimbulkan ketimpangan baru pada perekonomian

Pada hal ini melihat suatu tingkat kesejahteraan ekonomi pada masyarakat di suatu daerah yakni dengan cara memperhatikan pendapatan riil atau PDRB per kapita di daerah tersebut. Umumnya hal ini menjadi patokan untuk mengetahui tinggi atau tidaknya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dalam artian tidak semua wilayah memiliki pertumbuhan yang sama karena jangkauan daerah yang berbeda satu sama lainnya.

Teori pertumbuhan Harrod-Domar dijelaskan jika melihat dari sudut pandang modal atau kapital, output perkapita serta kenaikan suatu perekonomian kearah yang baik berarti naiknya pendapatan masyarakat tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mereka. Kedua faktor tersebut memang berkaitan tapi jika hanya berfokus pada pertumbuhan saja maka output per kapita kurang maksimal atau tidak mencukupi. Hal ini terjadi karena adanya proses pembangunan yang mengalami dilema antara perubahan pertumbuhan ekonomi dengan hasil distribusi pendapatan, tentunya pemerintah daerah harus siap menghadapi masalah ini dan memperkirakan rencana distribusi agar normal kembali. Pertumbuhan ekonomi harus berasal dari dalam daerah itu sendiri atau hasil pendapatan secara internal.

Yang berarti output per kapita yang menjadi sumber pendapatan tidak selalu berasal dari banyaknya dana asing sebagai bantuan, melainkan berasal dari sumber daya dan sektor unggulan atau potensi daerah yang dikembangkan di wilayah tersebut secara mandiri. Pada tingkat antar daerah atau wilayah perekonomian, output perkapita yang berasal dari dalam daerah biasanya memperhatikan besaran atau tinggi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Tengah, 2021).

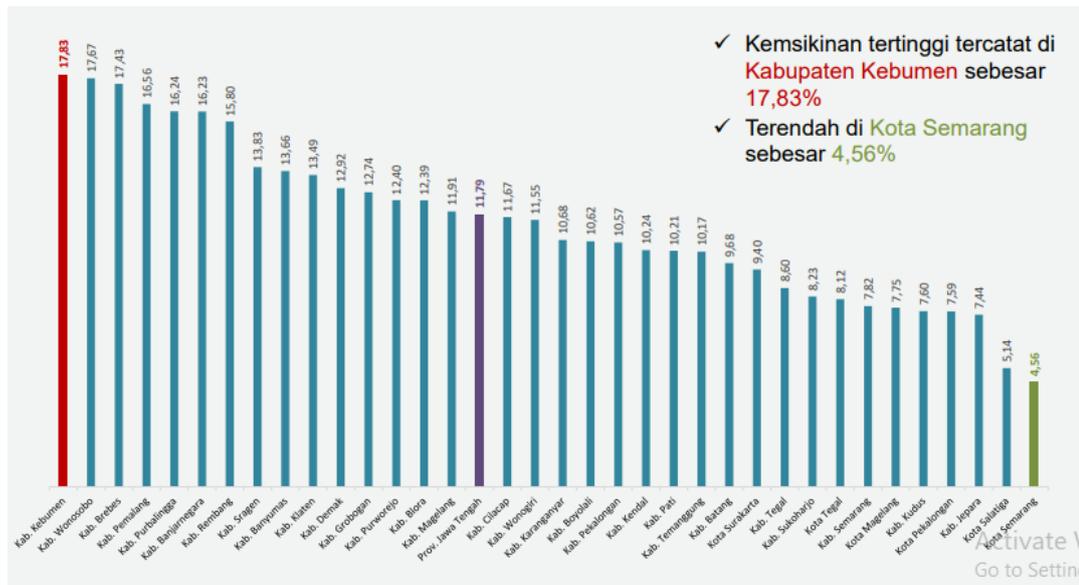
Pulau Jawa terdiri dari 6 (enam) wilayah Provinsi yang dimana seperti wikayah lainnya juga memiliki beragam persoalan atau masalah baik internal maupun eksternal yang harus dicari jalan keluarnya, diantaranya yaitu pada permasalahan tingkat pertumbuhan ekonomi atau pembangunan yang tidak merata. Aspek ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena pada dasarnya pembangunan merupakan sebuah strategi dan tujuan dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian yang cukup besar di pulau Jawa, Jawa Tengah masih memiliki masalah maupun kendala dengan yang namanya ketimpangan pembangunan. Otonomi daerah yang dicetuskan pemerintah menjadi dasar terjadi ketimpangan antar wilayah di tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Terdapat 29 Kabupaten dan 6 Kota, 537 Kecamatan, dan 750 kelurahan dan 7.809 desa di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 34,55 juta jiwa ditahun 2019 yang menyumbang 10,21% secara nasional.

Hadirnya investasi yang mampu berperan dalam perkembangan ekonomi wilayah dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki kontribusi pada provinsi Jawa Tengah. Capaian realisasi investasi Jawa Tengah pada Tahun 2021 berdasarkan data release dari BKPM RI yaitu sebesar Rp. 52,71 Triliun atau mencapai 98,5% dibandingkan dengan target investasi sebesar Rp 53,53 Triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar Rp 2,47 Triliun atau 4,92%.

Ketimpangan dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti halnya prioritas pembangunan berkelanjutan yang mana lebih aktif bergerak pada daerah perkotaan sedangkan pada daerah pedesaan jarang sekali adanya pembangunan infrastruktur ataupun realisasi kebutuhan publik. Dilihat dari perbedaan perlakuan ini proses pembangunan juga berdampak pada perbedaan pendapatan masyarakat baik itu masyarakat di kota maupun di desa.

Tujuan dari pembangunan ekonomi secara utama yakni dapat menuntaskan atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan maupun pembangunan yang terstruktur. Adanya pemerataan kesempatan kerja yang bersifat terbuka bagi masyarakat akan mengurangi laju kemiskinan serta memberikan pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan.

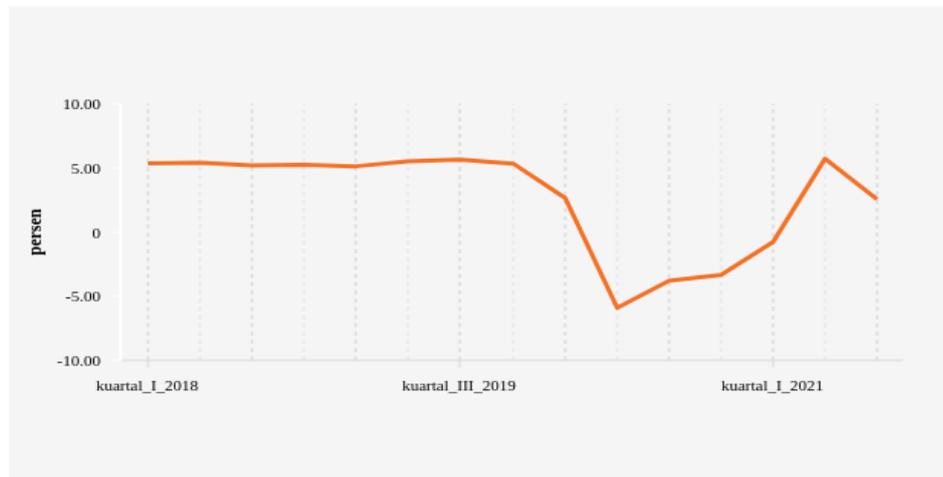


Sumber : BPS, 2021 (diolah)

### Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Jawa Tengah, 2021

Pada tingkat kemiskinan secara umum masih terjadi di wilayah pedesaan terbilang cukup tinggi dari pada wilayah perkotaan. Pada Maret 2021 – September 2021 persentase kemiskinan di perdesaan turun 0,63 persen poin dan di perkotaan turun 0,42 persen poin Pada September 2020 – September 2021 presentase kemiskinan di perdesaan turun 0,76 persen poin dan di perkotaan turun 0,41 persen poin.

Pertumbuhan ekonomi ditiap daerah diukur dengan besar nya rasio produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB ADHB Jawa Tengah mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp 359,54 triliun, dan apabila dilihat melalui PDRB ADHK naik sebesar 2,56% pada kuartal III tahun 2021 hal ini didukung dengan banyak nya faktor baik dari industri pengolahan, perdagangan besar maupun eceran memiliki kontribusi yang cukup membantu dalam pertumbuhan ekonomi daerah.



Sumber : Databooks, 2022 (diolah)

### **Gambar 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah periode 2018 - 2021**

Pada data yang ada arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pada menuntaskan segala bentuk kemiskinan, fokus kualitas yang ada pada SDM supaya berdaya saing, memperhatikan kualitas ekonomi yang ada serta kebutuhan, Prioritas pada sektor pemerataan pembangunan dan keunggulan SDA baik potensi pangan dan hasil energi, juga mengatasi kesenjangan antar wilayah.. Hal ini diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah maju.

Konvergensi yang terjadi di suatu wilayah dapat dikatakan menjadi absolut (tanpa syarat) maupun kondisional dan memerlukan adanya investasi dan juga penanaman modal baik modal fisik dan manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang memiliki kesenjangan (N. Gregory Mankiw, 2016). Konvergensi disini terjadi jika pendapatan suatu daerah yang rendah lebih cepat dari pada daerah dengan persentase perekonomian maju yang memiliki pendapatan jauh lebih tinggi.

Pendapatan tersebut diperoleh dari peraturan daerah tersebut guna menstabilkan kegiatan yang berasal dari tiap daerah untuk memajukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Agar ketimpangan dapat diminimalisir diharapkan daerah miskin mampu menuntaskan ketertinggalan mereka agar fenomena ketimpangan antar wilayah dapat diselesaikan.

Menurut Barro (2004) Konvergensi ialah fenomena yang bergerak menuju ke titik pertemuan. Peristiwa konvergensi sendiri dapat terjadi apabila kondisi pembangunan daerah tidak berjalan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Williamson yang mana disparitas pada pendapatan antar wilayah akan memudar perlahan setelah melewati fase pertama (*initial stage*) dan tahap penyelesaian/kematangan yakni (*mature stage*).

Adanya kesenjangan di tiap wilayah pada Provinsi Jawa Tengah terdapat keterkaitan terhadap konvergensi pendapatan antar wilayah. Hal ini didukung oleh studi **“Ketimpangan Pembangunan dan Konvergensi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”**.

Beberapa studi menunjukkan adanya pengaruh indikator ketimpangan pembangunan suatu wilayah, namun belum melakukan uji pengaruh kesenjangan pada daerah. Untuk itu studi ini bermaksud mengkaji faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan pada provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Latar belakang, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KONVERGENSI PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah terjadi Konvergensi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 – 2022?
2. Apakah terdapat variabel yang mempercepat laju Konvergensi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 - 2022
3. Bagaimana sektor unggulan mempengaruhi konvergensi pendapatan di Jawa Tengah tahun 2018 – 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis apakah terjadi konvergensi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2. Menganalisis Variabel yang mempercepat Laju Konvergensi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 - 2022
3. Menganalisis pengaruh sektor unggulan terhadap konvergensi pendapatan antar daerah di Jawa Tengah tahun 2018 - 2022

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bukti empiris serta dapat menjadi bahan evaluasi dasar pertimbangan pemerintah terutama untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan suatu referensi dalam kajian perbaikan stabilitas Perekonomian Daerah
3. Kegunaan untuk Peneliti diharapkan dapat menjadi sebuah tolak ukur untuk penelitian berikutnya supaya bisa lebih baik lagi